



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130, 3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-70/PB/2023 6 April 2023  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 2 (Dua) Berkas  
Hal : Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2023 pada Satker BLU

Yth. Para Pemimpin BLU (sebagaimana terlampir)

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2023 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara bagi Aparatur Negara, Pensiunan, dan Penerima Tunjangan yang diberikan sebagai upaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud di atas merupakan petunjuk teknis atas pelaksanaan pembayaran THR pada seluruh satuan kerja pada instansi pemerintah (satker) termasuk satker yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (satker BLU).
3. THR pada satker BLU diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai pada BLU baik yang berasal dari PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, maupun tenaga profesional non-PNS.
  - b. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas Ketua dan Anggota, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLU sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada BLU.
  - c. Pemberian THR dikecualikan untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada BLU yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah.
4. Ketentuan pemberian THR pada satker BLU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemberian THR pada BLU yang telah menerapkan remunerasi sesuai Keputusan Menteri Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) THR bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNPB BLU dengan komponen berupa gaji dan tunjangan kinerja berupa insentif sesuai ketentuan yang berlaku terkait remunerasi BLU.
    - 2) Gaji sebagaimana dimaksud pada poin 1) dibayarkan sebesar gaji yang diterima pada bulan Maret 2023 dengan ketentuan:

- a) Untuk Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLU yang berasal dari PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI berupa gaji yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBP BLU.
  - b) Untuk Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI berupa gaji yang bersumber dari PNBP BLU.
  - c) Untuk Dewan Pengawas, komponen yang diberikan berupa honorarium yang bersumber dari PNBP BLU.
- 3) Tunjangan kinerja berupa insentif sebagaimana dimaksud pada poin 1) dibayarkan dengan ketentuan:
- a) Untuk Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLU diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari insentif yang diterima pada bulan Maret 2023 dengan perhitungan capaian kinerja (*key performance indicators*) paling tinggi sebesar kinerja normal 100% sebagaimana diatur dalam KMK tentang penetapan remunerasi masing-masing BLU.
  - b) Untuk Dewan Pengawas diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari insentif yang diterima pada bulan Maret 2023 dengan perhitungan capaian indikator kinerja (*key performance indicators*) paling tinggi sebesar kinerja Pemimpin BLU normal 100% sebagaimana diatur dalam KMK tentang penetapan remunerasi masing-masing BLU.
- 4) Bagi Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI, THR diberikan dengan besaran paling tinggi sebesar THR yang dibayarkan kepada Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLU yang berasal dari PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI pada jabatan dengan kelas jabatan yang setara. Adapun ketentuan terkait penyetaraan kelas jabatan dimaksud ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLU.
- b. Pemberian THR pada BLU yang belum menerapkan remunerasi dengan Keputusan Menteri Keuangan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) THR diberikan dengan mengacu pada tata cara pembayaran THR di instansi pemerintah yang menjadi induk satker BLU sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
  - 2) THR diberikan sebesar penghasilan utuh yang diterima setiap bulan berupa gaji dan tunjangan kinerja yang bersumber dari Rupiah Murni.
  - 3) Gaji sebagaimana dimaksud pada poin 2) diberikan sebesar gaji yang diterima pada bulan Maret 2023 dengan komponen sebagaimana diatur dalam pengaturan umum gaji yang bersumber dari Rupiah Murni bagi PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI.
  - 4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada poin 2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang dibayarkan pada bulan Maret 2023.
- d. Pembayaran THR bagi Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tenaga profesional non-PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a) Warga Negara Indonesia;
    - b) Pada saat Peraturan Pemerintah tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;

- c) Pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU (PNBP BLU); dan
  - d) Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana pada angka 1) huruf b), THR dapat diberikan apabila telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima THR.
  - 3) Besaran THR bagi Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI adalah sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja/kontrak atau surat keputusan kepegawaian.
5. Dalam hal Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai BLU menerima lebih dari 1 (satu) THR, maka THR yang dibayarkan hanya 1 (satu) THR yang jumlahnya paling besar.
  6. THR yang diterima para Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai BLU tidak dikenakan iuran dan/atau potongan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Terhadap THR yang dibayarkan dikenakan pajak penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Untuk THR yang bersumber dari RM, ditanggung oleh Pemerintah dalam hal ini instansi induk pembayar gaji dan tunjangan sesuai mekanisme yang dilakukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sumber RM.
    - b. Untuk THR yang bersumber dari PNBP, ditanggung oleh Pemerintah dalam hal ini BLU melalui akun belanja gaji dan tunjangan yang digunakan dalam rangka pembayaran remunerasi sumber PNBP BLU.
  8. Mekanisme pengajuan, penyampaian, serta proses penggunaan aplikasi terkait pembayaran THR dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Mekanisme pembayaran THR bagi Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai pada BLU yang bersumber dari Rupiah Murni, melalui penerbitan SPM langsung ke rekening penerima dengan mengikuti tata cara ataupun petunjuk teknis terkait pembayaran THR tahun 2023 yang ada pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan/atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja masing-masing BLU.
    - b. Mekanisme pembayaran THR bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai pada BLU yang bersumber dari PNBP, dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengesahan belanja menggunakan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (SP3B BLU) tersendiri.
  9. Pembayaran THR pada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai pada BLU dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya, sesuai dengan mekanisme pembayaran sebagaimana angka 8. Dalam hal THR belum dapat dibayarkan pada 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
  10. Pembayaran THR bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai pada BLU dianggarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik  
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Pembina Teknis Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)
2. Dewan Pengawas BLU (terlampir)
3. Kepala Kantor Wilayah DJPb (terlampir)
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran
5. Direktur Sistem Perbendaharaan
6. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

**LAMPIRAN I**

Surat Dirjen Perbendaharaan

Nomor : S-70/PB/2023

Tanggal : 6 April 2023

**Yth. Para Pemimpin BLU:**

1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
3. RSPAD Gatot Subroto
4. Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
5. Rumah Sakit Tingkat II dr. AK Gani
6. Rumah Sakit Tingkat IV dr. Bratanata
7. Rumah Sakit Tingkat II Dustira
8. Rumah Sakit Tingkat III Ciremai
9. Rumah Sakit Tingkat IV Guntur
10. Rumah Sakit Tingkat IV Salak
11. Rumah Sakit Tingkat II dr. Soedjono
12. Rumah Sakit Tingkat III Wijayakusuma
13. Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen
14. Rumah Sakit Tingkat II dr. Hardjanto
15. Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia
16. Rumah Sakit Tingkat II R.W. Monginsidi
17. Rumah Sakit Tingkat II Udayana
18. Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada
19. Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J. A. Latumeten
20. Rumah Sakit Tingkat II Marthen Indey
21. Rumah Sakit Tingkat II Moh Ridwan Meuraksa
22. Rumah Sakit Tingkat II Iskandar Muda
23. Rumah Sakit TNI AL dr. Ramelan
24. Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa
25. Rumah Sakit Angkatan Udara Tingkat II dr. Moh. Salamun
26. Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolutito
27. Politeknik Keuangan Negara STAN
28. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
29. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
30. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
31. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
32. Pusat Investasi Pemerintah
33. Lembaga Manajemen Aset Negara
34. Pusat Veterinaria Farma Surabaya
35. Balai Besar Inseminasi Buatan Lembang
36. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
37. Politeknik AKA Bogor
38. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro
39. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik
40. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri
41. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung
42. PPSDM Minyak dan Gas Bumi

43. Politeknik Energi dan Mineral AKAMIGAS
44. PPSDM Geologi, Mineral dan Batubara
45. PPSDM Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
46. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi
47. Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara
48. Balai Besar Survey dan Pemetaan Geologi Kelautan
49. Balai Besar Survey dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
50. Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
51. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
52. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
53. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
54. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran
55. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran
56. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
57. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta
58. Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD
59. Politeknik Pelayaran Barombong
60. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
61. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
62. Politeknik Pelayaran Sorong
63. Politeknik Pelayaran Malahayati
64. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang
65. Politeknik Penerbangan Surabaya
66. Politeknik Penerbangan Medan
67. Politeknik Penerbangan Palembang
68. Politeknik Penerbangan Makassar
69. Politeknik Penerbangan Jayapura
70. Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun
71. Politeknik Pelayaran Surabaya
72. Politeknik Transportasi Darat Bali
73. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug
74. Politeknik Pelayaran Banten
75. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
76. Balai Kesehatan Penerbangan
77. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi
78. Distrik Navigasi Tanjung Priok
79. Bandar Udara Juwata Tarakan
80. Bandara Djalaluddin Gorontalo
81. Bandara Mutiara SIS Al Jufri Palu
82. UPBU Sultan Babullah Ternate
83. UPBU Domine Eduard Osok Sorong
84. UPBU Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda
85. Bandar Udara Kalimantan di Tanjung Redeb
86. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
87. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
88. Balai Pengujian Perkeretaapian
89. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
90. Universitas Singaperbangsa Karawang
91. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

92. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
93. Universitas Halu Oleo
94. Universitas Sriwijaya
95. Universitas Lampung
96. Universitas Tanjungpura
97. Universitas Lambung Mangkurat
98. Universitas Sam Ratulangi
99. Universitas Negeri Manado
100. Universitas Negeri Gorontalo
101. Universitas Tadulako
102. Universitas Negeri Makassar
103. Universitas Negeri Medan
104. Universitas Pattimura
105. Universitas Udayana
106. Universitas Mataram
107. Universitas Nusa Cendana
108. Universitas Bengkulu
109. Universitas Pendidikan Ganesha
110. Universitas Khairun
111. Institut Seni Indonesia Padang Panjang
112. Universitas Negeri Jakarta
113. Universitas Jenderal Soedirman
114. Universitas Jember
115. Universitas Riau
116. Universitas Jambi
117. Universitas Mulawarman
118. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
119. Universitas Palangkaraya
120. Politeknik Negeri Medan
121. Politeknik Negeri Jakarta
122. Politeknik Negeri Bandung
123. Politeknik Manufaktur Bandung
124. Politeknik Negeri Semarang
125. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
126. Politeknik Negeri Malang
127. Politeknik Negeri Bali
128. Politeknik Negeri Ujung Pandang
129. Politeknik Negeri Batam
130. Politeknik Negeri Jember
131. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
132. Museum Nasional
133. Politeknik Kesehatan Medan
134. Politeknik Kesehatan Jambi
135. Politeknik Kesehatan Bengkulu
136. Politeknik Kesehatan Palembang
137. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
138. Politeknik Kesehatan Denpasar
139. Politeknik Kesehatan Jakarta II
140. Politeknik Kesehatan Jakarta III
141. Politeknik Kesehatan Bandung

142. Politeknik Kesehatan Tasikmalaya
143. Politeknik Kesehatan Semarang
144. Politeknik Kesehatan Surakarta
145. Politeknik Kesehatan Yogyakarta
146. Politeknik Kesehatan Kupang
147. Politeknik Kesehatan Pontianak
148. Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur
149. Politeknik Kesehatan Banjarmasin
150. Politeknik Kesehatan Manado
151. Politeknik Kesehatan Makassar
152. Politeknik Kesehatan Malang
153. Politeknik Kesehatan Palangkaraya
154. Politeknik Kesehatan Surabaya
155. Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi
156. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
157. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung
158. Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
159. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
160. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
161. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta
162. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta
163. Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta
164. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta
165. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung
166. Rumah Sakit Paru Dr. Rotinsulu Bandung
167. Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung
168. Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
169. Rumah Sakit Paru Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor
170. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
171. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang
172. Rumah Sakit Jiwa Dr Soeroyo Magelang
173. Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga
174. Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
175. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
176. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta
177. Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
178. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
179. Rumah Sakit Umum Pusat dr. M. Djamil Padang
180. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Moh. Hoesin Palembang
181. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang
182. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang
183. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
184. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar
185. Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta
186. Rumah Sakit Infeksi Prof Dr Sulianti Saroso Jakarta
187. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta
188. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta
189. Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan
190. Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado
191. Rumah Sakit Mata Makassar



192. Rumah Sakit Umum Pusat dr Wahidin Sudirohusodo Makassar
193. Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
194. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof dr. Mahar Mardjono Jakarta
195. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta
196. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar
197. Universitas Islam Negeri Mataram
198. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
199. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
200. Institut Agama Islam Negeri Syeh Nurjati Cirebon
201. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
202. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
203. Institut Agama Islam Negeri Salatiga
204. UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
205. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
206. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
207. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
208. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
209. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
210. Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh
211. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
212. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
213. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
214. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
215. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
216. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
217. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
218. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
219. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
220. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
221. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
222. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
223. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
224. Badan Pelaksana Otorita Labuhan Bajo Flores
225. Badan Pelaksana Otorita Borobudur
226. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
227. Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
228. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
229. Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak
230. Rumah Sakit Bhayangkara Ambon
231. Rumah Sakit Bhayangkara Medan
232. Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung
233. Rumah Sakit Bhayangkara Sespimma Lemdiklat Polri
234. Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua
235. Rumah Sakit Bhayangkara Bandung
236. Rumah Sakit Bhayangkara Kediri
237. Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro
238. Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso
239. Rumah Sakit Bhayangkara Makassar
240. Rumah Sakit Bhayangkara Pusat Pusedokkes POLRI
241. Rumah Sakit Bhayangkara Pusdiksbhara Lemdiklat POLRI

242. Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa Lemdiklat POLRI
243. Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi
244. Rumah Sakit Bhayangkara Jambi
245. Rumah Sakit Bhayangkara Palembang
246. Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
247. Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya
248. Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar
249. Rumah Sakit Bhayangkara Mataram
250. Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya
251. Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan
252. Rumah Sakit Bhayangkara Kendari
253. Rumah Sakit Bhayangkara Manado
254. Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh
255. Rumah Sakit Bhayangkara Padang
256. Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru
257. Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu
258. Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu
259. Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk
260. Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung
261. Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang
262. Rumah Sakit Bhayangkara Kupang
263. Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin
264. Rumah Sakit Bhayangkara Palu
265. Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura
266. Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta
267. Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Lemdiklat POLRI
268. Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu
269. Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan
270. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
271. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
272. Pusat Pelayanan Teknologi

**LAMPIRAN II**

Surat Dirjen Perbendaharaan

Nomor : S-70/PB/2023

Tanggal : 6 April 2023

**Tembusan:****Pembina Teknis Kementerian Negara/Lembaga:**

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama
7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Riset dan Teknologi
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian
13. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Manajemen Investasi
14. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Pinjaman dan Hibah
15. Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Barang Milik Negara
16. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
17. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan
18. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama
19. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
20. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
21. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud
22. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud
23. Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian
25. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan
26. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan
27. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian
28. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
29. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
30. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian
31. Sekretaris, Kementerian Sekretariat Negara
32. Sekretaris, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
33. Sekretaris, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
34. Sekretaris Utama, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
35. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
36. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
37. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga
38. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Bekraf
39. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI
40. Kepala Pusat Keuangan POLRI
41. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Kemenkes
42. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Kepolisian RI

43. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan
44. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan
45. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat
46. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut
47. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara
48. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
49. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf TNI Angkatan Darat
50. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf TNI Angkatan Laut
51. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf TNI Angkatan Udara

**Dewan Pengawas BLU:**

1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
3. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit
4. Lembaga Manajemen Aset Negara
5. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
6. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)
7. RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta
8. RSUP Fatmawati Jakarta
9. RSUP Persahabatan Jakarta
10. RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta
11. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
12. RS Kanker Dharmais Jakarta
13. RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta
14. RSPI Prof. dr. Sulianti Saroso Jakarta
15. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
16. RSUP dr. Kariadi Semarang
17. RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung
18. RSUP Sanglah Denpasar
19. RSUP dr. Muhammad Hoesin Palembang
20. RSUP Dr. M Djamil Padang
21. RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
22. RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
23. RSUP dr. H. Adam Malik Medan
24. RSUP Prof. dr. RD Kandou Manado
25. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
26. RS Jiwa dr. Marzoeki Mahdi Bogor
27. RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang
28. RS Orthopedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta
29. RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
30. RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
31. RS Mata Cicendo Bandung
32. RS. Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi
33. RS. Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Bogor
34. RSUP dr. Sitanala Tangerang
35. RS Paru dr. HA Rotinsulu Bandung
36. Politeknik Kesehatan Bandung
37. Politeknik Kesehatan Medan
38. Politeknik Kesehatan Jakarta III
39. Politeknik Kesehatan Jakarta II
40. Politeknik Kesehatan Semarang

41. Politeknik Kesehatan Makassar
42. Politeknik Kesehatan Surabaya
43. Politeknik Kesehatan Tanjung Karang
44. Politeknik Kesehatan Surakarta
45. Politeknik Kesehatan Malang
46. Politeknik Kesehatan Pontianak
47. Politeknik Kesehatan Yogyakarta
48. Politeknik Kesehatan Bengkulu
49. RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
50. RS Bhayangkara Tk. II Mappa Oudang, Makassar
51. RS Bhayangkara Tk. II Semarang
52. RS Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Jakarta
53. RS Bhayangkara TK. II Kediri
54. RS Bhayangkara Tk. III Lemdiklat Polri
55. RS Bhayangkara Tk. II HS. Samsuero Mertojoso, Surabaya
56. RS Bhayangkara Tk. III Pusdik Sabhara Porong
57. RS Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung
58. RS Bhayangkara Tk. III Palembang
59. RS Bhayangkara Tk. III Nganjuk
60. RS Bhayangkara Tk. III Tulungagung
61. RS Bhayangkara Tk. III Lumajang
62. RS Bhayangkara Tk. III Bondowoso
63. RS Bhayangkara Tk. III Jayapura
64. RS Bhayangkara Tk. III Korbrimob Kelapa Dua
65. RS Bhayangkara Tk. III Setukpa Sukabumi
66. RS Bhayangkara Tk. III Bengkulu
67. RS Bhayangkara Tk. III Banjarmasin
68. RS Bhayangkara Tk. III Pontianak
69. RS Bhayangkara Tk. III Kupang
70. RS Bhayangkara Tk. III Kendari
71. RS Bhayangkara Tk. III Jambi
72. RS Bhayangkara Tk. II Medan
73. RS Bhayangkara Tk. III Padang
74. RS Bhayangkara Tk. III Pekanbaru
75. RS Bhayangkara Tk. III Denpasar
76. RS Bhayangkara Tk. III Yogyakarta
77. RS Bhayangkara Tk. III Palangkaraya
78. RS Bhayangkara Tk. III Balikpapan
79. RS Bhayangkara Tk. III Manado
80. RS Bhayangkara Tk. III Mataram
81. RS Bhayangkara Tk. III Palu
82. RS Bhayangkara Tk. III Hasta Brata Batu Malang
83. RS Bhayangkara Tk. III Bojonegoro
84. RS Bhayangkara Tk. III Indramayu
85. RS Bhayangkara Tk. III Bandar Lampung
86. RS Bhayangkara Tk. IV Banda Aceh
87. RS Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi
88. RS Bhayangkara Tk. III Watukosek, Jatim
89. RS Bhayangkara Tk. III Ambon
90. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

91. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar
92. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta
93. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta
94. Politeknik Transportasi Darat Indonesia - Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi
95. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta
96. Balai Kesehatan Penerbangan
97. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
98. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal
99. Politeknik Pelayaran Surabaya
100. Politeknik Penerbangan Surabaya
101. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
102. Politeknik Penerbangan Medan
103. Politeknik Penerbangan Makassar
104. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong
105. Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh
106. Politeknik Pelayaran Banten
107. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun
108. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang
109. Politeknik Transportasi Darat Bali
110. Politeknik Penerbangan Palembang
111. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug
112. Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi
113. Politeknik Penerbangan Jayapura
114. UPBU Juwata, Tarakan
115. UPBU Mutiara Sis Al-Jufri, Palu
116. UPBU Djalaluddin, Gorontalo
117. UPBU Kalimantan, Kaltim
118. Politeknik Pelayaran Sorong
119. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
120. UIN Alauddin Makassar
121. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
122. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
123. UIN Raden Fatah Palembang
124. UIN Ar-Raniry Aceh
125. UIN Walisongo Semarang
126. UIN Sumatera Utara
127. UIN Sultan Syarif Kasim Riau
128. UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi
129. UIN Sunan Ampel Surabaya
130. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
131. UIN Mataram
132. UIN SATU Tulungagung
133. UIN Malang
134. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
135. UIN UIN Imam Bonjol Padang
136. UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
137. Universitas Negeri Semarang
138. Universitas Mulawarman
139. Universitas Lampung
140. Universitas Negeri Jakarta

141. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
142. Museum Nasional Jakarta
143. Universitas Jember
144. Politeknik Negeri Jakarta
145. Universitas Gorontalo
146. Universitas Bengkulu
147. Universitas Sriwijaya
148. Universitas Jenderal Soedirman
149. Universitas Haluoleo
150. Universitas Udayana
151. Universitas Riau
152. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
153. Universitas Mataram
154. Universitas Tadulako
155. Univ. Pendidikan Ganesha
156. Universitas Nusa Cendana
157. Universitas Jambi
158. Universitas Sam Ratulangi
159. Universitas Tanjungpura
160. Politeknik Negeri Malang
161. Universitas Negeri Medan
162. Universitas Pattimura, Ambon
163. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jatim
164. Politeknik Manufaktur Bandung
165. Universitas Singaperbangsa Karawang
166. Politeknik Negeri Semarang
167. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
168. Politeknik Negeri Bali
169. Universitas Khairun
170. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)
171. Lembaga Pelayanan Pemasaran (LPP KUKM)
172. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM
173. Balai Besar Industri Agro (BBIA)
174. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T)
175. BPKS SABANG
176. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS)
177. Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Blora
178. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi, Blora
179. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara, Bandung
180. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Jakarta
181. RS Tk. II Putri Hijau, Medan
182. RSPAD Gatot Subroto
183. RSAU dr. Esnawan Antariksa, Jakarta
184. RS Tk. II Moch. Ridwan Meuraksa Kesdam Jaya, Jakarta
185. RS Tk. II Dustira, Cimahi
186. RS Tk. III Ciremai, Cirebon
187. RS Tk. II Soepraoen, Malang
188. RS Tk. II Pelamonia, Makassar
189. RS Tk. I dr. Ramelan, Wonokromo, Surabaya

190. RS Tk. I RSPAU dr. S. Hardjolukito, Yogyakarta
191. RSAU Dr. M. Salamun, Bandung
192. RS Tk. II Udayana Kodam IX/Denpasar
193. RS Tk. II Kartika Husada Kodam XII/Tanjung Pura, Kalbar
194. RS Tk. II dr. Soedjono Kodam IV/Diponegoro, Magelang
195. RS Tk. II R.W. Monginsidi Kodam XIII/Merdeka, Manado
196. RS Tk. II Prof. dr. J.A. Latumenten Kodam XVI/Patimura, Ambon
197. RS Tk. III Wijayakusuma Purwokerto
198. RS Tk. IV Bratanata Jambi
199. RS Tk. IV. Salak Kesdam III/Slw, Bogor
200. RS Tk. IV. Guntur Kesdam III/Slw, Garut
201. RS Tk. II Iskandar Muda Kesdam IM, Banda Aceh
202. RS Tk. II dr. A.K. Gani Kesdam II/Swj, Palembang
203. RS Tk. II dr. R. Hardjanto Kesdam VI/Mlw, Balikpapan
204. RS Tk. II Marthen Indey Kesdam XVII/Cen, Jayapura
205. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
206. Pusat Veteriner Farma Surabaya
207. Balai Inseminasi Buatan Lembang
208. PPK Kemayoran
209. PPK Gelora Bung Karno
210. BP BATAM
211. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)
212. Lembaga Pengelola Dana & Usaha Keolahragaan (LPDUK)

**Kepala Kantor Wilayah DJPb:**

1. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
2. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara
3. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
4. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
5. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
6. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
7. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
8. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung
9. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
10. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
11. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten
12. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
13. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
14. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
15. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
16. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
17. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
18. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
19. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
20. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
21. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara
22. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
23. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
24. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur



25. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
26. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
27. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
28. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
30. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
31. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
32. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
33. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
34. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua